

KEMISKINAN, MOBILITAS PENDUDUK, DAN AKTIVITAS *DEREP*: STRATEGI PEMENUHAN PANGAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA*

*Pande Made Kutanegara***

Pengantar

Program revolusi hijau yang dilaksanakan secara intensif sejak awal Orde Baru telah mendorong proses transformasi sosial-ekonomi yang sedemikian pesat di pedesaan Jawa. Kesuksesan program ini telah meningkatkan produksi pertanian dan memacu perubahan sosial ekonomi penduduk pedesaan Jawa. Jumlah penduduk miskin telah berkurang sangat cepat dari 47 persen pada tahun 1971 menjadi 15 persen pada tahun 1995. Indikator ekonomi juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa, yakni dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 8 persen per tahun (Hill, 1996).

Namun, di sisi lain, program ini membawa dampak yang kurang menguntungkan terutama di bidang ketenagakerjaan. Peluang kerja di sektor pertanian berkurang dengan cepat, sehingga kegiatan-kegiatan pertanian yang melibatkan penduduk miskin berkurang dan hilang. Salah satu peluang kerja yang hilang adalah *derep*. Aktivitas ini hilang bersamaan dengan berkembangnya sistem *tebasan* di pedesaan. Hal ini telah menghilangkan satu-satunya akses penduduk miskin terhadap ketersediaan pangan mereka. Oleh karena itu, secara tidak langsung, revolusi hijau telah mengakibatkan

pengangguran dan peningkatan kemiskinan di pedesaan Jawa (Sairin, 1976; Stoler, 1978).

Penelitian-penelitian intensif pada pertengahan masa Orde Baru menunjukkan bahwa minat peneliti terhadap proses transformasi tenaga kerja pedesaan di sektor pertanian turun drastis. Hal ini dipicu oleh dominasi penelitian tentang transformasi tenaga kerja sektor pertanian menuju sektor non pertanian, baik di pedesaan dan terutama di perkotaan. Penelitian tentang aktivitas buruh di sektor pertanian diabaikan. Hal ini tidaklah aneh karena pada pertengahan masa Orde Baru, peluang kerja nonpertanian terbuka sangat lebar. Bahkan, peluang kerja itulah yang dipandang sebagai penyelamat persoalan ketenagakerjaan di pedesaan Jawa.

Masalah dan Tujuan Penelitian

Keamanan dan ketahanan pangan masih merupakan masalah yang berat dan rumit bagi penduduk miskin di Indonesia. Ketidakpastian pendapatan telah mempersulit upaya pemenuhan kebutuhan pangan secara memadai. Padahal, pangan merupakan kebutuhan dasar demi kelangsungan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, setiap orang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara.

* Hasil penelitian dengan Dana Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2002.

** Doktorandus, Magister Sains, Staf Pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Berbagai studi tentang *derep* dan aktivitas sektor pertanian menunjukkan bahwa sumbangan *derep* sangat besar bagi ekonomi rumah tangga. Selain itu, *derep* sangat menentukan kelancaran proses panen. Ketiadaan buruh tani pemetik padi akan sangat mengganggu proses di sektor pertanian.

Sebagai upahnya, *penderep* menerima *bawon* berupa bagian atau persentase dari besarnya hasil yang diperoleh pada saat itu. Hayami dan Kikuchi (1987), membedakan *bawon* dengan *tebasan*. Dalam sistem *tebasan* upah buruh dibayar dengan uang kontan, sedangkan pada sistem panen tradisional upah buruh dibayar dengan upah gabah. Kesimpulan semacam itu ternyata keliru karena walaupun institusi *tebasan* telah berkembang ternyata sistem *bawon* masih diterapkan di pedesaan Jawa. Hal ini justru sangat menguntungkan bagi penduduk yang terlibat di dalamnya.

Dua buah penelitian *derep* yang dilakukan pada pertengahan tahun 1980-an menunjukkan bahwa hasil yang diterima oleh *penderep* tidaklah seberapa banyak. Sairin (1976) menyatakan bahwa setiap harinya *penderep* hanya sanggup menuai padi sekitar 20-30 kilogram. Bila pembagian *bawon* adalah sepersepuluh, itu berarti seorang *penderep* hanya menghasilkan 2 sampai 3 kilogram gabah. Demikian juga penelitian Siahaan (1983) yang menyatakan bahwa penghasilan *penderep* tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Ternyata, pada akhir masa Orde Baru, aktivitas *derep* masih berkembang cukup intensif pada beberapa wilayah di pedesaan Jawa. Salah satu daerah yang masyarakatnya sangat aktif melakukan kegiatan ini adalah penduduk Dusun Sompok, Desa Sriharjo, Kabupaten Bantul. Hampir sebagian besar penduduknya terlibat dalam kegiatan *derep* di berbagai wilayah dan terutama di Purworejo.

Berdasarkan hal itu, dua pertanyaan pokok yang ingin diajukan adalah (1) faktor-faktor apakah yang mendorong keterlibatan penduduk dusun ini dalam aktivitas *derep* (2) bagaimanakah peran *derep* terhadap ekonomi rumah tangga penduduk miskin.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menonjolkan pendalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Agar diperoleh data yang mendalam, diambil empat kepala rumah tangga sebagai informan kunci. Pengumpulan data terutama dilakukan dengan observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Meskipun demikian, agar diperoleh gambaran secara lebih menyeluruh tentang aktivitas *derep*, juga dilakukan wawancara terhadap 184 kepala rumah tangga.

Kemiskinan dan Akses ke Sumber Daya

Dusun Sompok merupakan bagian dari Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Wilayah dusun ini terletak di kaki Pegunungan Sewu yang tandus dan kering di bagian selatan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian besar wilayahnya terletak di areal perbukitan yang tandus dan hanya sebagian kecil terletak di daerah lembah di pinggir Sungai Oyo. Dusun ini mempunyai luas 79 hektar terdiri atas tanah tadah hujan 16 hektar, ladang 49 hektar, hutan 5 hektar, dan tanah kesultanan 9 hektar. Sisanya digunakan sebagai fasilitas umum seperti jalan, sungai, dan tempat peribadatan. Jumlah penduduk Dusun Sompok adalah 983 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 482 jiwa (49%) dan wanita 501 jiwa (51%). Mereka terbagi dalam 188 rumah tangga.

Wilayah ini terletak sekitar 8 kilometer di bagian selatan kota Kecamatan Imogiri. Untuk mencapai wilayah dusun ini, orang harus melewati jalan aspal yang sudah rusak dan sebagian masih jalan berbatu. Ketika masuk wilayah dusun ini, pemandangan menjadi lain. Di kiri kanan terdapat bukit-bukit yang gersang dan kering serta Sungai Oyo yang cukup dalam di sebelah kanan. Pemukiman penduduk terletak di lereng-lereng bukit di sebelah kiri, berjejer mengikuti kontur tanah.

Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani, terutama petani

lahan kering. Mengingat sebegini besar wilayahnya adalah perbukitan yang kering, mereka hanya bisa bercocok tanam pada saat musim hujan. Jenis tenamannya adalah padi *gaga*, dan palawija yang berupa kacang-kacangan, jagung, ketela dan sayur-sayuran. Meskipun mereka menyatakan diri sebagai petani, bila dilihat rata-rata pemilikan lahannya sangat rendah, yakni hanya 500 meter persegi per rumah tangga. Dengan luas lahan semacam itu, jelas tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengelola dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Masalah sempitnya pemilikan lahan di Sriharjo telah dikemukakan oleh Penny dan Singarimbun (1973). Pada awal Orde Baru, rata-rata pemilikan lahan pertanian di desa ini adalah 0,15 hektar per rumah tangga. Angka ini terus menurun menjadi 0,10 hektar pada tahun 1993 (Singarimbun, 1993) dan menurun menjadi 0,04 hektar pada saat ini.

Selain memiliki keterbatasan akses terhadap lahan pertanian, mereka juga menghadapi keterbatasan akses terhadap air irigasi pertanian. Pada musim hujan, mereka memanfaatkan air hujan yang mengalir melalui parit-parit kecil dari atas bukit. Pada musim kemarau, ketika cadangan air di areal perbukitan semakin menipis, mereka beralih memanfaatkan air Kali Oyo, yang posisinya jauh di bawah permukaan dusun.

Keterbatasan akses ke berbagai sektor ekonomi dan keterbatasan sumber daya alam mengakibatkan penduduk hidup dalam kondisi kemiskinan. Dengan menggunakan patokan lokal (kemiskinan relatif), penduduk dapat diklasifikasikan menjadi 18 persen termasuk mampu (*wong nduwe*), 47 persen termasuk cukupan, dan 28 persen miskin (*ora nduwe*), dan sisanya sangat miskin (*wong sekeng*).

Secara historis, pengolahan lahan kering sebagai tempat bercocok tanam belum lama dilakukan. Kegiatan ini dimulai pada awal tahun 1980-an dipicu oleh masuknya program revolusi hijau. Dengan masuknya berbagai program pembangunan pertanian di Sompok, terjadilah revolusi sistem pertanian di wilayah ini. Lahan-lahan kering yang semula dibiarkan kosong karena tidak subur, perlahan-lahan mulai ditanami dengan ketela pohon (*Manihot utilissima Pohl*), kacang-kacangan dan padi (*oriza sativa*). Demikian juga halnya dengan masuknya padi baru yang tahan hama (VUTW), yang lebih pendek umurnya dan hasilnya lebih banyak. Jenis padi ini mendorong penduduk setempat mencoba menanamnya di lahan-lahan kering. Keberhasilan mereka mengolah lahan kering juga didukung oleh masuknya pupuk kimia. Masuknya pupuk kimia telah mengakibatkan intensifikasi pengolahan lahan kering di daerah ini. Para petani ternyata tidak banyak menggunakan pupuk kandang dan daun-daunan sebagai sumber pupuk sebelum dikenal pupuk kimia. Hal itu disebabkan oleh jumlah ternak yang sangat terbatas¹. Menurut penduduk, ketersediaan pupuk kimia inilah yang telah mendorong pengolahan tanah tegalan yang gersang di bagian utara desa. Bersamaan dengan pengolahan lahan kering, tanah-tanah tegalan yang dekat dengan Sungai Oyo juga mulai dibuka. Semula, sebagian besar tanah tersebut berisi tanaman tahunan seperti sukun (*Artocarpus altillis*), sengo (*Enterolobium cyelocarpum*), kelapa (*Cocos nucifera*) dan jati (*Tectona grandis Lf*). Akhirnya, tanah tersebut diubah menjadi tanah tegalan dan sawah tadah hujan dan pohon-pohon besar mulai ditebangi².

- 1 Pada awal Orde Baru, penduduk yang memiliki sapi sangat terbatas. Mereka memperkirakan hanya sekitar 5 orang. Umumnya mereka adalah orang kaya di dusun itu. Selain faktor ketiadaan uang untuk membeli sapi, faktor keterbatasan lahan untuk mencari rumput juga menjadi kendala. "Hanya orang kaya yang mampu memiliki sapi waktu itu, ungkap salah seorang penduduk".
- 2 Setelah pohon-pohon besar di sekeliling kampung di tebang dan arealnya dibuka untuk sawah tadah hujan, wilayah yang semula relatif rindang menjadi sangat terbuka sehingga hawa panas terutama di musim kemarau semakin terasa di wilayah ini.

Melalui pembukaan lahan baru, akses penduduk ke sektor pertanian menjadi semakin besar. Namun, dalam tanah yang sangat miskin hara, tanaman yang bisa dibudidayakan hanyalah ketela pohon (*Manihot utilissima* Pohl). Penduduk merasa senang dengan keberhasilan menanam tanaman-tanaman palawija seperti ketela pohon dan kacang-kacangan dan sekali-sekali tanaman padi *gaga* di musim hujan. Penanaman ketela pohon yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu lama menimbulkan masalah terhadap keberlangsungan sistem pertanian di sana, sebab ketela pohon dapat menanduskan lahan secara cepat, menghabiskan kandungan natrium, dan fosfor. Pada waktu panen, tanaman ini merusak lapisan tanah paling atas secara serius dan mungkin sekali meningkatkan terjadinya erosi (Palte, 1984: 46; Roche, 1984:14). Bagi petani, di tengah harapan untuk memperoleh kehidupan pada tanah yang tidak subur, bagaimanapun terdapat pilihan-pilihan terbatas dengan menanam tanaman apapun yang dapat tumbuh di sana.³

Untuk mengairi lahan pertaniannya, mereka terpaksa mengangkut air dari sungai dengan menggunakan ember dan alat pikulan. Puluhan orang tua, terutama wanita dan sebagian anak-anak bekerja pada sore hari untuk mengangkut air ke lahan pertanian mereka. Penggunaan pompa air untuk mengangkat air sungai juga telah dikenal di desa ini. Namun, harga pompa air yang mahal mengakibatkan hanya 4 orang penduduk yang mampu membelinya. Bantuan pompa air dari Departemen Pertanian beberapa tahun yang lalu, sekarang tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan. Mereka yang tidak memiliki pompa air, juga dapat menyewanya seharga Rp. 2.500 per jam. Mereka membuat lubang tempat menampung air dari sungai, kemudian menggunakan blek untuk mengangkut air

tersebut ke tanaman yang perlu disiram. Dengan cara itu, mereka hanya menyewa pompa air dalam waktu yang lebih singkat. Walaupun demikian, penggunaan pompa air masih memberatkan keuangan mereka. Oleh karena itu, mereka lebih suka mengangkut air secara langsung dari Sungai Oyo. Dengan bekerja keras itulah, mereka mampu menghasilkan umbi-umbian, sayur-sayuran dan kacang-kacangan di musim kemarau.

Kemiskinan dan Mobilitas Penduduk

Keterbatasan dan tidak adanya akses ke tanah menjadi faktor utama kemiskinan di Sompok. Untuk menyiasatinya, sejak dulu penduduk di dusun tersebut telah mengembangkan kegiatan-kegiatan di luar sektor pertanian. Sejak zaman kolonial Belanda, mereka telah mengembangkan kegiatan di luar pertanian, terutama mencari kayu bakar, membuat arang, mencari daun jati, dan mencuri kayu ke hutan-hutan sekitarnya.

Pada masa akhir Orde Baru, arah dan bentuk mobilitas serta jenis pekerjaannya semakin bervariasi. Mereka menjadi buruh tanam dan buruh tebang tebu (*Saccharum officinarum*) secara musiman. Pada saat tanam tebu dan musim tebang tebu, mereka pergi naik sepeda ke wilayah sekitarnya bekerja sebagai penebang tebu. Pada musim paceklik, sebagian penduduk berkeliling ke desa-desa sekitarnya untuk menjadi buruh tani dan buruh serabutan. Oleh karena itu, penduduk dari daerah sekitarnya sejak lama telah mengenal buruh tani dari dusun ini. Keterbatasan pekerjaan dan pendapatan di dalam desa telah mendorong mereka untuk pergi ke luar wilayahnya. Mereka sangat ulet dan gigih untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka bersedia bekerja apapun asalkan memperoleh pendapatan. Karena itu, mereka rela pergi ke luar dusun dan desa selama berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan. Oleh karena itu, kasus di dusun ini jelas sangat

3 Walaupun pemerintah kolonial Belanda telah memperkenalkan ketela pohon ini pada pertengahan abad ke sembilan belas, namun penduduk yang terbiasa mengkonsumsi tanaman ini secara langsung hanya terdapat di daerah-daerah pegunungan sewu di bagian selatan Jawa, seperti di daerah Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan (Palte, 1984: 45)

berbeda dengan pendapat Koentjaraningrat (1984:198) yang menyatakan para buruh tani berusaha bekerja di luar desa, bukan karena peluang mendapatkan pekerjaan di kampungnya terbatas, tetapi lebih disebabkan oleh karena mereka merasa malu (*lingsem*) menjadi buruh tani di desa asalnya. Keterlibatan penduduk Sompok sebagai buruh tani di luar desa, jelas-jelas dipaksa oleh terbatasnya akses mereka ke sektor pertanian di desa asal dan bukan karena malu bila bekerja di dalam desa.

Mobilitas sirkuler ke daerah perkotaan dilakukan oleh penduduk yang bekerja di sektor informal seperti buruh bangunan, buruh industri, tukang becak, dan pedagang kecil di Kota Yogyakarta. Mobilitas ini mulai berkembang ketika berbagai peluang kerja di kota semakin meningkat. Perbaikan ekonomi dan pembangunan berbagai sarana di kota, memerlukan tenaga kerja yang relatif banyak. Salah satu sektor yang berkembang sangat cepat pada pertengahan masa Orde Baru adalah sektor bangunan dan industri yang memerlukan tenaga kerja cukup besar. Oleh karena itu, setiap hari penduduk yang bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang bakso, tukang becak, dan pegawai negeri bekerja ke kota dan pulang pada sore hari. Setiap hari mereka *nglaju* ke tempat tujuan. Selain karena jarak yang relatif dekat, alasan sosial dan kultural juga menjadi penyebabnya. Dalam masyarakat Jawa, aktivitas sosial di desa seperti tolong-menolong dan *tetulang layat* masih sangat tinggi frekuensinya (Koentjaraningrat, 1984). Ketika salah seorang tetangganya meninggal atau mengadakan aktivitas ritual yang berkaitan dengan *life cycle* mereka, anggota komunitas lain juga diharapkan hadir. Oleh karena itu, penduduk desa akan berusaha meluangkan waktu untuk bisa datang dalam acara-acara itu. Dibandingkan dengan alasan-alasan ekonomis yang mendorong pilihan mobilitas sirkuler, penduduk Sriharjo menganggap bahwa alasan sosial kultural yang lebih menentukan tipe mobilitas mereka. Rasa malu, sungkan dan tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat masih cukup tinggi pada masyarakat ini.

Sementara itu, pegawai negeri, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, yang bekerja di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, dan sebagainya menetap di daerah tujuan. Mereka pulang kembali ke desa setiap enam bulan sekali atau satu tahun sekali terutama pada saat hari Lebaran. Pada saat itulah, mereka berkumpul bersama sanak keluarganya. Di antara mereka, sebagian besar adalah penduduk berusia muda dan umumnya wanita. Beberapa di antaranya adalah pasangan usia muda yang baru menikah. Bagi yang telah memiliki anak, anak-anak mereka ditinggal di desa dan diasuh oleh kakek maupun neneknya. Setiap tiga bulan atau 6 bulan sekali, orang tuanya datang ke desa menengok anak-anaknya.

Aktivitas Derep Rumah Tangga Miskin

Dalam sistem *tebasan*, sebagian besar hasil panen telah dijual kepada *penebas* satu minggu sebelumnya. Para *penebas* itulah yang bertanggung jawab atas kegiatan panen itu. Para *penebas* ini tidak berasal dari desa maupun wilayah yang sama sehingga mereka tidak terikat kepada kewajiban adat setempat. Di samping itu, mereka juga dapat memakai tenaga buruh dalam jumlah yang mereka perlukan saja. Para *penebas* umumnya membawa buruh panen sendiri, yang tidak menggunakan ani-ani, melainkan arit, yang memungkinkan mereka bekerja lebih cepat, dan dengan demikian biaya panen pun dapat dihemat lebih dari separuhnya. Dengan sistem *tebasan* ini, para petani pemilik tanah dapat memperoleh keuntungan sebesar 25 %. Penyebaran aturan-aturan ketenagakerjaan yang membatasi semacam itu merupakan salah satu perkembangan paling dramatis dalam pertanian lahan basah selama tahun 1980-an. Sistem ini menambah jumlah pengangguran di dalam masyarakat-masyarakat desa di Jawa (Koentjaraningrat, 1984).

Untuk daerah pedesaan Yogyakarta, penelitian yang dilakukan Stoller (1978) di daerah Kulon Progo, Yogyakarta, menemukan dengan sistem panen lama (*bawon*) penduduk desa yang miskin bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan memanen; hal ini

menjadi sumber vital untuk mendapatkan nafkah bagi mereka. Dengan sistem baru, yakni melalui penggantian cara panen terbuka dengan tenaga kerja yang dikontrak (*tebasan*), semua kesempatan telah hilang. Dalam aturan tersebut, seorang pedagang (*penebas*) membeli hasil panen di sawah, dan ia membawa sekelompok orang untuk memanennya. Perubahan dari sistem *bawon* ke *tebasan* merupakan suatu metode untuk mengurangi biaya panen dan untuk menghindarkan diri dari berbagai kewajiban terhadap kaum kerabat dan kaum tetangga yang makin lama dirasakan makin berat, dan untuk menghindarkan diri dari serbuan para buruh panen yang jumlahnya makin meningkat itu.

Sangat berbeda dengan temuan di atas, bagi masyarakat Sompok, perubahan institusi panen dari *bawon* ke *tebasan* tidak berdampak negatif, bahkan justru sangat positif. Ada beberapa alasan yang mendukung hal itu, yakni rata-rata pemilikan lahan yang sempit tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjual seluruh hasil panen melalui *tebasan*. Sebagian besar di antara mereka memanfaatkan hasil panen sebagai *food saving* dibandingkan sebagai sumber pendapatan. Selain itu, walaupun mereka memerlukan uang, mereka lebih senang menjual beras sesuai dengan besarnya jumlah uang yang mereka butuhkan dibandingkan menjual gabah sekaligus. Oleh karena itu, sampai saat ini sistem *bawon* masih berlangsung, walaupun semakin terbatas cakupannya. Kebiasaan menebas-kan padi lebih banyak dilakukan petani pemilik lahan luas.

Bagi penduduk miskin yang umumnya tidak memiliki tanah pertanian, munculnya sistem *tebasan* ternyata justru membuka peluang kerja baru. Ketika sistem *bawon* masih kuat, sebagian besar diantara mereka

hanya menjadi *pengasak*⁴. Akses mereka ke sektor pertanian justru dihalangi oleh rekrutmen tenaga kerja dalam sistem *bawon* yang lebih menguntungkan kelompok tetangga dan kerabat. Dalam sistem *tebasan*, *rekrutment* tenaga kerja dilakukan lebih terbuka. Hal ini membuka peluang pekerjaan bagi penduduk miskin.

Saat ini wilayah Sompok merupakan penyuplai buruh panen padi cukup terkenal di wilayah Bantul, bahkan sampai di luar kabupaten, seperti Kulon Progo, Purworejo dan Sleman. Mereka dikenal sebagai buruh tani yang mau bekerja keras dan selalu siap bekerja sewaktu-waktu. Kesadaran yang kuat sebagai kelompok yang tidak memiliki akses langsung terhadap pertanian lahan basah, telah memunculkan dorongan untuk bekerja keras dalam proses panen tersebut. Sebagai buruh panen padi yang pendapatannya dihitung berdasarkan persentase hasil panen yang diperoleh (*borongan*), mereka dipacu untuk bekerja lebih keras, sehingga mereka dapat membawa hasil yang lebih besar.

Derep dan Strategi Pemenuhan Pangan Rumah Tangga Miskin

Tingginya intensitas keterlibatan penduduk dalam aktivitas *derep* tampak dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebanyak 55,2 persen (100 RT) rumah tangga secara rutin melakukan *derep* dan sisanya tidak. Mereka yang menyatakan tidak melakukan *derep* bervariasi antara yang dulu rutin sekarang tidak melakukan, yang dulu kadangkala sekarang berhenti, dan hanya sebagian kecil yang memang belum pernah melakukan *derep*. Mereka yang tidak ikut *derep* lagi mempunyai alasan sudah tua sehingga tenaganya tidak kuat lagi, alasan sakit, dan sebagian kecil karena sudah

4 Pengasak adalah orang yang tidak bisa ikut serta dalam proses panen karena berbagai keterbatasan yang dimiliki seperti tidak ada hubungan kerabat, berasal dari luar wilayah atau bisa juga karena dianggap tidak mampu bekerja keras karena sudah tua, cacat dan sebagainya. Oleh karena itu mereka hanya boleh mengumpulkan dan mengambil sisa-sisa panen. Mereka boleh memungut bulir-bulir padi yang masih tertinggal di areal persawahan maupun mengambil sisa-sisa padi yang masih melekat di batang padi. Dalam strata sosial masyarakat desa, tukang asak merupakan kelompok paling miskin di desa

kehabisan waktu bekerja di sektor nonpertanian. Ini menandakan bahwa aktivitas *derep* bukanlah fenomena baru bagi penduduk di dusun ini. Perbedaannya adalah bila sebelum tahun 1980-an mereka dipekerjakan oleh pemilik sawah, sedangkan pada saat ini mereka dipekerjakan oleh *penebas* (pedagang padi). Selain itu, *penderep* sekarang telah membentuk kelompok yang lebih profesional dengan anggota 4-6 orang. Hampir 75 pesen mereka yang melakukan *derep*, memilih wilayah kerja di kabupaten Purworejo dan Kulon Progo.

Ada dua tipe *derep* yang dikenal yakni *derep* gabah, yang berarti mereka akan mendapatkan hasil berupa gabah dan kedua adalah gabah *damen*, yang berarti bahwa mereka akan mendapatkan hasil berupa *damen* (batang padi yang digunakan sebagai makanan sapi). Dilihat dari musim, mereka mengenal *derep gadhu* (musim kemarau) dan *derep rendhengan* (musim hujan). Untuk musim kemarau, mereka rata-rata bekerja selama 10-14 hari, sedangkan musim hujan sekitar 14-24 hari. Perbedaan lama kerja juga akan berakibat pada besar kecilnya hasil yang mereka peroleh. Besarnya *bawon* adalah antara 1:9 dan 1:10 bergantung pada alat yang mereka miliki dan fasilitas yang diterima dari *penebas*. Rata-rata jumlah *bawon* yang mereka peroleh selama dua minggu bekerja berkisar antara 400-500 kg gabah kering. Gabah-gabah tersebut diangkut dengan truk ke dusun Sompok dan disimpan pada kotak-kotak penyimpanan gabah.

Gabah yang diperoleh dari *derep* biasanya tidak dijual, tetapi digunakan untuk memenuhi konsumsi harian. Jika mereka menjual *bawon*, biasanya dalam jumlah sedikit dan lebih banyak digunakan untuk sewa transportasi dari tempat *derep* ke Sompok. Hampir seluruh hasil *derep* disimpan di dalam penyimpanan gabah berupa kotak segi empat yang diletakkan di dapur mereka. Simpanan gabah tersebut dikeluarkan sedikit demi sedikit (seirit mungkin) sehingga bisa menyambung persediaan gabah sampai masa *derep* berikutnya. Ini merupakan salah satu strategi mereka untuk menghemat konsumsi. Dalam kaitan itu mereka melakukan penghematan, baik

secara kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian *food security* (keamanan pangan) akan dapat berjalan dengan baik. Ketika persediaan gabah menipis, kuantitas konsumsi diturunkan dengan jalan mengurangi konsumsi beras dan menggantikannya dengan tiwul. Selain itu, kuantitas makan juga dikurangi dari tiga kali sehari menjadi dua kali sehari. Strategi semacam itu merupakan suatu upaya untuk memperbesar cadangan konsumsi sepanjang tahun.

Walaupun berbagai strategi telah dikembangkan, tetapi seringkali cadangan gabah mereka suatu ketika habis sama sekali. Kasus-kasus kekurangan persediaan bahan makanan atau kekurangan makan terjadi pada rumah tangga miskin yang tidak memiliki anggota rumah tangga yang kuat untuk melakukan *derep*. Mereka umumnya adalah janda atau orang tua tanpa anak. Krisis bahan makanan akan diselesaikan dengan jalan meminjam atau minta bantuan dari sanak saudara dan tetangga mereka. Namun, keadaan semacam itu tidak mungkin bisa berlangsung terus. Bantuan dari tetangga maupun saudara sangat terbatas jumlah maupun waktunya. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah dengan jalan mengonsumsi *tiwul* dalam menu harian mereka. *Tiwul* harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan beras.

Aktivitas *derep* sebagai salah satu strategi guna mendapatkan akses ke bahan makanan berupa beras sangat penting artinya bagi rumah tangga miskin di Sompok. Hal itu sangat terasa pada saat krisis ekonomi 1998, ketika rumah tangga miskin yang tidak memiliki lahan pertanian maupun tidak memiliki anggota rumah tangga yang kuat bekerja, merasakan dampak krisis yang hebat. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makannya. Pada saat itu, harga berbagai kebutuhan pokok meningkat dengan tajam, sehingga harga beras naik dari Rp. 700,00 menjadi Rp. 2.500,00. Hal ini sangat menyulitkan kehidupan ekonomi rumah tangga miskin. Sebagai jalan keluarnya, penduduk secara beramai-ramai melakukan *derep* ke berbagai daerah. Jumlah *penderep* secara tiba-tiba melonjak tinggi di dusun ini. Mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja

dari berbagai jenis industri maupun buruh bangunan ikut serta dalam kegiatan *derep*. Ironisnya pada saat yang sama di berbagai wilayah muncul pula *penderep-penderep* baru sebagai akibat macetnya sektor non pertanian dan sektor informal di kota. Hal ini telah memicu persaingan di kalangan para *penderep*. Bahkan untuk melindungi warganya, pemerintah kabupaten Purworejo sempat menghimbau kepada para *penebas* padi agar mendahulukan *penderep* dari wilayah setempat dibandingkan dengan dari daerah luar. Akibatnya, muncul konflik-konflik kecil di areal persawahan, sebagai akibat memperebutkan areal *derep*. Meskipun demikian, rumah tangga miskin di Sompok masih memperoleh hasil cukup besar dari *derep* di luar desanya.

Kesimpulan

Walaupun dengan berbagai perubahan, aktivitas *derep* ternyata masih berlangsung di pedesaan Jawa. Pada beberapa daerah miskin, *derep* sangat penting artinya bagi ekonomi rumah tangga. Sebagai penduduk miskin, berbagai strategi mereka kembangkan agar tetap *survive*. Sumbangan aktivitas *derep* sangat besar dan penting bagi ekonomi rumah tangga miskin, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lahan pertanian.

Pekerjaan *derep* memang merupakan pekerjaan yang sangat berat. Namun, bagi penduduk miskin yang hanya memiliki tenaga kerja sebagai modal utama, beratnya pekerjaan tidak menjadi hambatan bagi mereka. Penghasilan *derep* sangat menggiurkan bagi mereka. Hal itulah yang mendorong, di dusun ini muncul kelompok-kelompok *penderep* yang selalu dipekerjakan oleh *penebas* dari Purworejo dan Kulon Progo.

Hasil *derep* berupa gabah mereka simpan dan digunakan secara hati-hati, karena kegiatan *derep* hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Konsumsi beras mereka atur dengan sebaiknya-baiknya. Bila persediaannya masih relatif banyak, mereka akan makan nasi sebanyak tiga kali sehari, tetapi bila semakin menipis, mereka hanya makan nasi dua atau satu kali

dalam satu hari. Sebagai makanan pengganti mereka masih mengandalkan *tiwul*.

DAFTAR PUSTAKA

- Breman, Jan. 1992. "Kerja dan Kehidupan Buruh Tani di Pesisir Jawa". Dalam *Prisma* 21, 3. Jakarta: LP3ES.
- Bromley, Ray & Chris Gerry. 1979. 19 "Who are the Casual Poor?". Dalam Ray Bromley and C. Gerry (ed.), *Casual Work and Poverty in Third World Cities*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Diaz M.N. dan Jack M. Potter. 1967. "Introduction: The Sosial Life of Peasant", Dalam J.M. Potter et al. (eds.), *Peasant Society: A Reader*. Canada: Little Brown and Company Inc.
- De Haan, Leo, J. 2000. *Livelihood, Locality and Globalisation*. Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hill, Hal. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: PAU Studi Ekonomi UGM dan Tiara Wacana.
- Penny dan Masri Singarimbun. 1973. *Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmetic from Sriharjo*. Ithaca: Cornell University.
- Sairin, Sjafri. 1976. "Beberapa Masalah *derep*: Studi Kasus Yogyakarta". Dalam *Prisma* (5) 6. Jakarta: LP3ES.
- Scott, J.C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Hen Haven & London, Yale University Press.
- Singarimbun, Masri. 1993. "The Opening of a Village Labour Market: Change in employment and Welfare in Sriharjo". Dalam Chris Manning and Joan Hardjono

Kemiskinan, Mobilitas Penduduk, dan Aktivitas Derep

- (eds.), Indonesian Assesment 1993, *Labour: Sharing in the Benefits of Growth?*. Canberra. Department of Political and Sosial Change Research Scholl of Pasific Studies, Australian National University.
- _____. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stoler, A. 1978. "Some Socio-Economic Aspect of Rice Harvesting in A Javanese Village". Dalam *Masyarakat Indonesia* (II) No. 1.
- Tjondronegoro, Sediono MP. 1978. "Bawon dan Faktor-faktor Penentu Sosial Ekonominya". Dalam *Masyarakat Indonesia* (V) No. 2.